

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya yang disusun berdasarkan RPJMD Perubahan dan Rencana Strategis Perubahan serta evaluasi anggaran tahun sebelumnya telah dapat diselesaikan.

Penyusunan LKIP Tahun 2018 Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya ini tetap mengacu pada peraturan yang berlaku dan memuat beberapa program dan kegiatan prioritas yang direncanakan/ditargetkan serta realisasinya dari Perjanjian Kerja baik untuk 5 tahun kedepan maupun untuk tahun 2018 ini diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, disamping itu pula untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya sebagai fasilitator dan mediator antara Pemerintah Kota Palangka Raya dan DPRD Kota Palangka Raya.

Sangat disadari bahwa penyusunan LKIP Tahun 2018 ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu mohon kiranya saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk mendukung kesempurnaan penyusunan LKIP ini terutama atas hasil evaluasi untuk tahun mendatang. Tidak lupa diucapkan terimakasih kepada segenap pihak yang telah berperan memberikan dukungan demi kelancaran penyusunan LKIP tahun 2018 Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan penyertaan kepada kita bersama dalam mengemban tugas untuk mendukung terwujudnya *good governance* dan *clean govermance* di Pemerintah Kota Palangka Raya, jayalah selalu kota cantik Palangka Raya yang kita cintai.

Palangka Raya, April 2018

SEKRETARIS DPRD
KOTA PALANGKA RAYA



Dra. SITTI MASMAH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630324 199103 2 010

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur perajatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya penyusunan Laporan Kinerja Insulasi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya yang disusun berdasarkan RPJMD Perubahan dan Rencana Strategis Perubahan serta evaluasi anggaran tahun sebelumnya telah dapat diselesaikan.

Penyusunan LKIP Tahun 2018 Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya ini tetap mengacu pada peraturan yang berlaku dan memuat beberapa program dan kegiatan prioritas yang direncanakan/ditargetkan serta realisasinya dari Perjanjian Kerja baik untuk tahun kedepan maupun untuk tahun 2018 ini diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, disamping itu pula untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya sebagai fasilitator dan mediator antara Pemerintah Kota Palangka Raya dan DPRD Kota Palangka Raya.

Sangat disadari bahwa penyusunan LKIP Tahun 2018 ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu mohon kiranya saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk mendukung kesempurnaan penyusunan LKIP ini terutama atas hasil evaluasi untuk tahun mendatang. Tidak lupa diucapkan terimakasih kepada segenap pihak yang telah berperan memberikan dukungan demi kelancaran penyusunan LKIP tahun 2018 Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan penyertaan kepada kita bersama dalam mengemban tugas untuk mendukung terwujudnya *good governance* dan *cleav governance* di Pemerintah Kota Palangka Raya, jayalah selalu kota cantik Palangka Raya yang kita cintai.

Palangka Raya, April 2018


SEKRETARIS DPRD
KOTA PALANGKA RAYA
Dra. SITI MASMAH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630324 199103 2 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	4
B. Tujuan Pelaporan Kinerja	4
C. Landasan Hukum	5
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	9
A. Rencana Strategis	9
A.1 Visi	10
1. Visi	10
2. Misi	11
B. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2013 – 2018	11
B.1 Visi	11
B.2 Misi	11
B.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	11
B.4 Indikator Kinerja Program	11
B.5 Strategi dan Kebijakan	12
B.6 Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
A.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018	25
A.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	34
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis	36

A.4	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi	37
A.5	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
A.6	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja	39
B.	Realisasi Anggaran	40
BAB IV	PENUTUP	44
a....	SARAN	44
b. ..	KESIMPULAN.....	45

Lampiran-lampiran

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2018 dalam mencapai sasaran strategis. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2018 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2018 yang melibatkan seluruh unsur di Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2018 ini bukan upaya untuk menemukan kelemahan-kelemahan melainkan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah. Sehingga sasaran dan target kinerja yang akan dicapai dapat terlihat dan terukur dalam rangka mencapai visi dan misi SKPD yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 – 2018, Rencana Strategis Perubahan Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 dan DPA SOPD Perubahan Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2018 terdapat 1 (satu) sasaran strategis yaitu Meningkatnya produk-produk kebijakan dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase produk hukum daerah, untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada RPJMD terdapat 1 (satu) Program Prioritas yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat dan untuk mencapai program prioritas didukung dengan 5 (lima) Program pendukung yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018, berorientasi pada pencapaian target persentase produk hukum daerah (legislasi) dengan target 100% dan terealisasi 91,85% dengan kategori sangat berhasil output yang diharapkan berupa produk Peraturan Daerah ^{iv} an target jangka menengah sebanyak 40 (empat puluh) terealisasi sebanyak 82 (delapan puluh dua) sehingga outcome yang diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan daerah untuk pelaksanaan pembangunan di Kota Palangka Raya.

Dengan melihat hasil tersebut kinerja merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “God Governance dan Clean Government” yang secara terus menerus membangun dan mengembangkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palangka Raya.

Palangka Raya, April 2019

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA PALANGKA RAYA,



Dra. Hj. SITTI MASMAH
Pembina Utama Muda
Nip. 19630324 199103 2 010

Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018, berorientasi pada pencapaian target persentase produk hukum daerah (legislasi) dengan target 100% dan terealisasi 91,85% dengan kategori sangat berhasil output yang diharapkan berupa produk Peraturan Daerah ^{iv} an target jangka menengah sebanyak 40 (empat puluh) terealisasi sebanyak 32 (delapan puluh dua) sehingga outcome yang diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan daerah untuk pelaksanaan pembangunan di Kota Palangka Raya.

Dengan mandat hasil tersebut kinerja merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "Good Governance dan Clean Government" yang secara terus menerus membangun dan mengembangkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palangka Raya.

Palangka Raya, April 2019

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA PALANGKA RAYA,



Dra. Hj. SITI MASMAH
Pembina Utama Muda
Nip. 19630324 199103 2 010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menyesuaikan ketentuan Pasal 14, Pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan pelaporan kinerja pada akhir tahun berjalan.

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Pelaporan Kinerja ini juga diharapkan dapat memacu untuk bekerja lebih baik, cermat dan terukur sehingga mengurangi kesalahan yang harusnya dapat dihindari.

Dikarenakan Pelaporan Kinerja ini berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja, maka hendaknya dapat terlihat hasil kinerja satu tahun pada Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Secara umum pada Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya pada Tahun 2018, terdiri-dari :

- a. 1 (satu) Sekretaris DPRD.
- b. 3 (tiga) Bagian yaitu Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Perundang-undangan, Persidangan dan Humas, serta Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
- c. 6 (enam) Sub Bagian, jadi 2 (dua) Sub Bagian dalam 1 (satu) Bagian.
- d. DPRD terdiri dari 30 (tiga puluh) orang yaitu 3 (tiga) Pimpinan dan 27 Anggota DPRD.

Sedangkan secara keseluruhan jumlah personil pada Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya saat ini berjumlah 95 orang termasuk tenaga kontrak dan tenaga ahli fraksi/pakar, dengan pembagian sebagai berikut :

TABEL. 1**JUMLAH PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KOTA PALANGKA RAYA
BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN**

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	31
2.	Pegawai Harian Lepas/Tenaga Kontrak	43
3.	Tenaga Ahli/Pakar DPRD	6
4.	Tenaga Ahli Fraksi	6
JUMLAH		86

Dilihat dari tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari 7 (tujuh) orang berpendidikan Pasca Sarjana (S2), 18 (delapan belas) orang berpendidikan Sarjana (S1), 5 (lima) orang berpendidikan SLTA atau sederajat, 1 (satu) orang berpendidikan SLTP atau sederajat atau secara table dapat dilihat sebagai berikut :

TABEL. 2**JUMLAH PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KOTA PALANGKA RAYA
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN (ORANG)						
		S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD
1.	ASN	7	18	0	0	5	1	0
2.	Pegawai Harian Lepas/Tenaga Kontrak	0	20	1	0	21	1	0
3.	Tenaga Ahli/Pakar DPRD	1	4	1	0	0	0	0
4.	Tenaga Ahli Fraksi	2	4	0	0	0	0	0
JUMLAH		10	46	2	0	26	2	0

TABEL. 3**JUMLAH PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KOTA PALANGKA RAYA
MENURUT PANGKAT DAN GOLONGAN**

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1.	IV/a IV/b IV/c IV/d	2 2 1 0
2.	III/a III/b III/c III/d	5 8 7 2
3.	II/a II/b II/c II/d	0 1 1 2
4.	I/a I/b I/c I/d	0 0 0 0
5.	Tenaga Ahli Fraksi/Pakar	12
6.	Pegawai Harian Lepas/ Tenaga Kontrak	43
JUMLAH		86

TABEL. 4**JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA YANG SUDAH MENGIKUTI
PENJENJANGAN**

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Diklatpim IV/ Adum	6
2.	Diklatpim III/Adumla	3
3.	Diklatpim II	1
JUMLAH		10

TABEL. 5
UNIT KERJA

NO.	UNIT KERJA
SEKRETARIAT DPRD KOTA PALANGKA RAYA	
1.	Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - Sub Bagian Program dan Keuangan
2.	Bagian Perundang-undangan, Persidangan dan Humas, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Sub Bagian Kajian Perundang-undangan - Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Humas
3.	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan : <ul style="list-style-type: none"> - Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran - Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Kerjasama
4.	Tenaga Ahli/Pakar DPRD : <ul style="list-style-type: none"> - Mendukung Tugas, fungsi dan wewenang Pimpinan DPRD dan Komisi-Komisi serta Alat Kelengkapan DPRD.
5.	Tenaga Ahli Fraksi : <ul style="list-style-type: none"> - Mendukung Tugas, Fungsi dan Wewenang Fraksi-Fraksi (6 Fraksi) yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi GERINDA, Fraksi HANURA, Fraksi GOLKAR, Fraksi PKB dan Fraksi PAN-DEMOKRAT.

Dilihat dari Aspek Strategis sudah memungkinkan dalam pelaksanaan tugas terutama dalam hal pelayanan baik terhadap Pemerintah Daerah, organisasi itu sendiri maupun terhadap Anggota DPRD Kota Palangka Raya.

Sedangkan permasalahan utama yang dirasakan adalah dikarenakan adanya anggaran disinkronisasi dengan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah dan penjadwalan kegiatan yang belum konsisten.

B. Tujuan Pelaporan Kinerja

Sedangkan Tujuan Pelaporan Kinerja adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberiman data atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Pelaporan Kinerja mengacu pada beberapa peraturan/perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01);

D. Sistematika Penulisan

Sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang (Penjelasan Umum, Aspek Strategis Organisasi)
- 1.2 Tujuan Pelaporan Kinerja
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Permasalahan Utama Pada Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bagian ini diuraikan secara singkat beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja dengan rincian kelengkapan dokumen berupa RENSTRA Instansi, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Penetapan Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi.
 - A.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - A.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - A.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - A.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standarnasional;

A.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

A.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

A.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Termasuk Saran serta uraian kesimpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja.
- 2) Lain-Lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya merupakan salah satu amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Renstra Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan serta program dan kegiatan Sekretariat DPRD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Renstra Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya merupakan bagian dari perencanaan daerah, sehingga harus sinkron dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan yang mengacu pada target indikator – indikator yang telah ditetapkan serta mendukung program-program prioritas Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Perubahan Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaian melalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sehingga kinerja dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dapat terus ditingkatkan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah Kebijakan dan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Palangka Raya, sehingga Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya menetapkan Rencana Strategis Perubahan Tahun 2013 – 2018 sebagai acuan dalam rencana menyusun kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi serta tujuan strategis Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya berpedoman pada dokumen :

1. RPJMD Tahun 2013 – 2018
2. Renstra Tahun 2013 – 2018
3. Renja
4. Penetapan Kinerja Tahun 2018

A.1. RPJMD 2013 – 2018

1. Visi

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, pada pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, maka visi harus menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Berangkat dari itu maka Visi RPJMD Pemerintah Kota Palangka Raya :

“ Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang berwawasan Lingkungan berdasarkan Falsafah Huma Betang “

Visi tersebut haruslah didukung oleh serangkaian Misi Pembangunan dengan melihat seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pencapaian Visi maka dirumuskan Misi.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Misi RPJMD Pemerintah Kota Palangka Raya 2013-2018 sebagai komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama darti arah pembangunan Pemerintah Kota Palangka Raya lima tahun kedepan yang berkaitan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Palangka Rayaterkait visi,misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu :

- Misi ke IV: **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance)**

B. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2013- 2018.

B.1 Visi

Visi merupakan komitmen, upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan perumusan masalah visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi, sehingga pernyataan Visi Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya adalah :

“ Menjadikan Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya yang Profesional dan Akuntabel sebagai Unsur Pendukung Tugas dan Fungsi DPRD “

B.2 Misi

Misi Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya berisi pernyataan tentang apa yang akan dilakukan oleh seluruh bagian untuk mencapai visi Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya. Perumusan misi mengacu kepada tugas dan wewenang yang telah diberikan Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya. Adapun Misi yang wajib dijadikan pegangan pelaksanaan tugas seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya adalah :

Mewujudkan jalinan hubungan kerja antara lembaga DPRD dengan Eksekutif dan Masyarakat

B.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan merupakan perwujudan dari visi dan misi yang telah ditetapkan, serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.

Dalam rangka mencapai misi Sekretariat DPRD Kota Palangaka Raya tujuan dalam jangka waktu perencanaan tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :

Meningkatnya Kapasitas aparatur dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu yang ingin dicapai atau dihasilkan Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam rentang waktu masa renstra. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya :

Meningkatnya Produk-produk kebijakan

B.4 Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya yang dinyatakan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan Indikator yang berada dalam perspektif manfaat bagi stake holders yang menunjukkan peran utama Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dalam peningkatan pengelolaan administrasi dan keuangan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya. Penetapan indikator dominan dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis.

Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur menggunakan indikator keluaran (output)

Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan kearah tercapainya tujuan/ sasaran.

Tabel 6

SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	
1.	Meningkatnya produk-produk kebijakan	1.	Persentase Produk Hukum Daerah (Legislasi)

B.5 Strategi dan Kebijakan

Dengan melihat Visi dan Misi, Kebijakan serta Strategi maka langkah yang diambil yaitu menjalankan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra yaitu :

1. Program Prioritas :

1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

2. Program Pendukung :

1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Strategi :

- Meningkatkan dukungan keahlian yang kuat dalam membantu DPRD menyampaikan produk hukum daerah dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan
- Meningkatkan optimalisasi peran Sekretariat DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Kebijakan :

- Melakukan kerjasama antara pihak eksekutif dengan legislative dalam penyelesaian administrasi produk hukum daerah
- Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama anatara pihak Sekretariat DPRD dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas sumber daya manusia.

Sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi dari Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya adalah memfasilitasi antara legislatif dan eksekutif baik dari anggarannya maupun kelancaran administrasi yang harus benar-benar profesional dan akuntabel sehingga Tri Fungsi DPRD dapat berjalan dengan maksimal.

B.6 Penetapan Kinerja Rencana Aksi

Tabel 7

FORMULIR PENETAPAN KINERJA RENCANA AKSI SEKRETARIAT DPRD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3		4
1	1.1 Persentase produk hukum daerah (legislasi)	100%		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
		8 Ranperda	01	Pembahasan Rancangan Perda
		70 Rapat	02	Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan dan Rapat Paripurna
		3 Kali	03	Kegiatan Reses
		173 orang/trip	04	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah
		50 Orang/trip	05	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
		3 Kali	06	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
		4 Item	07	Evaluasi pelaksanaan perda pemerintah kota palangka Raya
		7 Perda	08	Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
		12 Bulan	09	Publikasi peraturan perundang-undangan
		14 Dokumen	10	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan Perundang-undangan Daerah
		30 Anggota DPRD	11	Medical Check Up Anggota DPRD
		156 OB	12	Penyedia Jasa Operasional Tenaga Ahli DPRD
		40 Kegiatan	13	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah
		12 Bulan	14	Peningkatan Kinerja Pimpinan DPRD
		40 Risalah	15	Peningkatan kinerja risalah dan rapat
		9 Dokumen Rapat Badan Musyawarah	16	Penyusunan Program kerja dan Evaluasi kinerja legislatif
		3 Rapat Badan Kehormatan	17	Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan
		3 Pelantikan	18	Pelantikan Anggota DPRD
		10 Pertemuan	19	Pertemuan Nasional/Regional Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
		5 Kegiatan	20	Tahapan Penganggaran APBD Serta Penetapannya

4	Kali rapat	21	Penguatan Pengawasan Atas Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	95%		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2000	surat	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12	Bulan	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5	Kegiatan	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12	Bulan	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas
564	OB	05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
12	Bulan	06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5	Kegiatan	07	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja
12	Bulan	08	Penyediaan Alat Tulis Kantor
12	Bulan	09	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
4	Item	10	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / penerangan bangunan kantor
12	Bulan	11	Penyediaan Makanan dan minuman
85	Orang	12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
90	Orang	13	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1	Kegiatan	14	Penyediaan jasa event Palangka Raya Fair
288	Item/Thn	15	Penyediaan Jasa Publikasi surat kabar dan majalah
140	Kegiatan	16	Kegiatan kehumasan dan protokol
	95%		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	item	01	Pengadaan peralatan Rumah Jabatan / Dinas
1	Set	02	Pengadaan peralatan gedung kantor
4	Item	03	Pengadaan Mebeleur
1	Kegiatan	04	Pengadaan Tanah
12	Bulan	05	Pemeliharaan rutin/ berkala Rumah Jabatan
12	Bulan	06	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor
3	Kegiatan	07	Rehabilitasi sedang / berat Rumah Jabatan
1	Kegiatan	08	Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor
3	Unit	09	Pengadaan AC
	95%		
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur
160	Stel	01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
	95%		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
75	Orang	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal

		95%			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
		3	Laporan	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPRD
		19	Laporan	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan
		5	Dokumen	03	Penyusunan Program dan Rencana Kerja
		4	Dokumen	04	Inventarisasi Barang Milik Daerah

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA PALANGKA RAYA
PERIODE TAHUN 2018**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERSENTASE	PROGRAM	ANGGARAN PROGRAM (RP.)	KEGIATAN	ANGGARAN	OUTPUT/KELUARAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	TARGET REALISASI (%)							
											I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Meningkatnya Produk - produk Kebijakan	1.1 Persentase produk hukum daerah (legislasi)	100%	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp 13.929.547.300	Pembahasan Rancangan Perda	Rp 1.360.235.000	Tersedianya Perda Kota Palangka Raya	8 Ranperda	10 Ranperda	1	2	4	3	12,50%	25,00%	50,00%	37,50%
						Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan dan Rapat Paripurna	Rp 524.605.000	Terpenuhinya Kegiatan Rapat - rapat DPRD	70 Rapat	75 Rapat	9	15	27	24	12,86%	21,43%	36,00%	32,00%
						Kegiatan Reses	Rp 265.425.000	Tersedianya Dana Reses	3 Kali	3 Kali	0	1	1	1	-	33,33%	33,33%	33,33%
						Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah	Rp 35.800.000	Tersedianya Dana Kunjungan Kerja Dalam Daerah	173 orang/trip	76 orang/trip	39	12	14	11	22,54%	6,94%	8,09%	6,36%
						Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp 720.550.000	Tersedianya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	50 Orang/trip	43 Orang/trip	21	0	0	22	42,00%	-	-	44,00%
						Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Rp 70.820.000	Tersedianya Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	3 Kali	4 Kali	0	0	2	2	-	-	50,00%	50,00%
						Evaluasi pelaksanaan perda pemerintah kota palangka Raya	Rp 43.715.000	Tersedianya Pelaksanaan Evaluasi Perda	7 Perda	8 Perda	0	0	8	0	-	-	114,29%	-
						Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan	Rp 337.387.100	Tersedianya Raperda yang akan disusun	5 Ranperda	5 Ranperda	0	3	2	0	-	60,00%	40,00%	-

Publikasi peraturan perundang-undangan	Rp 50.935.000	Tersedianya Publikasi Peraturan Perundang - Undangan	12 Bulan	12 Bulan	3	3	3	3
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan Perundang-undangan Daerah	Rp 397.865.000	Tersedianya Raperda yang dikaji keserasiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	14 Dokumen	14 Dokumen	3	4	4	3
					21,43%	28,57%	28,57%	21,43%
Medical Check Up Anggota DPRD	Rp 59.350.000	Tersedianya check kesehatan awal untuk anggota DPRD	30 Anggota DPRD	13 Anggota DPRD	0	0	0	13
					-	-	-	100,00%
Penyedia Jasa Operasional Tenaga Ahli DPRD	Rp 396.000.000	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi dan Pakar DPRD Kota Palangka Raya	156 OB	144 OB	36	36	36	36
					23,08%	23,08%	23,08%	23,08%
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah	Rp 4.504.000.000	Terlaksananya Kunjungan Kerja DPRD Ke Luar Daerah	40 Kegiatan	40 Kegiatan	5	10	20	5
					12,50%	25,00%	50,00%	12,50%
Peningkatan Kinerja Pimpinan DPRD	Rp 1.214.250.000	Tersedianya Belanja Rumah Tangga dan penunjang kegiatan Unsur Pimpinan DPRD	12 Bulan	12 Bulan	3	3	3	3
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Peningkatan kinerja risalah dan rapat	Rp 64.450.000	Tersedianya Laporan Risalah Rapat dan Fasilitasi Rapat	40 Risalah	45 Risalah	4	13	13	15
					10,00%	32,50%	32,50%	37,50%

					Penyusunan Program kerja dan Evaluasi kinerja legislatif	Rp 1.315.250.000	Tersedianya Rapat Badan Musyawarah	9	Dokumen Rapat Badan Musyawarah	11	Dokumen Rapat Badan Musyawarah	3	2	4	2	
												33,33%	22,22%	44,44%	22,22%	
					Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan	Rp 208.825.000	Tersedianya Rapat Badan Kehormatan	3	Rapat Badan Kehormatan	1	Rapat Badan Kehormatan	1	0	0	0	
												33,33%	-	-	-	
					Pelantikan Anggota DPRD	Rp 156.825.400	Tersedianya dana pelantikan PAW Anggota DPRD dan Pelantikan Kepala Daerah Kota Palangka Raya	3	Pelantikan	3	Pelantikan	0	1	2	0	
												-	33,33%	66,67%	-	
					Pertemuan Nasional/Regional Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp 712.600.000	Tersedianya dana pertemuan nasional/regional bagi pimpinan dan anggota dprd	10	Pertemuan	10	Pertemuan	3	3	2	2	
												30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	
					Tahapan Penganggaran APBD Serta Penetapannya	Rp 1.447.500.000	Tersedianya penganggaran APBD 2018 serta penetapannya	5	Kegiatan	5	Kegiatan	1	2	2	0	
												20,00%	40,00%	40,00%	-	
					Penguatan Pengawasan Atas Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 43.159.800	Tersedianya Rapat Pengawasan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan	4	Kalirapat	4	Kalirapat	0	4	0	0	
												-	100,00%	-	-	
2.				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 7.473.274.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 23.575.000	jumlah surat yang diproses	2000	surat	2000	surat	400	400	600	600
												20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 344.000.000	Tersedianya pembayaran penunjang pelayanan administrasi	12 Bulan	12 Bulan	3	3	3	3
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 138.500.000	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1	1	2	1
					20,00%	20,00%	40,00%	20,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas	Rp 402.800.000	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	12 Bulan	3	3	3	3
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 1.210.000.000	Tersedianya dana guna pembayaran Jasa Tenaga Kontrak/ Pegawai Harian Lepas	564 OB	516 OB	129	129	129	129
					22,87%	22,87%	22,87%	22,87%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 240.200.000	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	3	3	3	3
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Rp 96.800.000	Tersedianya jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1	1	2	1
					20,00%	20,00%	40,00%	20,00%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 82.000.000	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	3	3	3	3
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Rp 379.039.000	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	3	3	3	3
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Penyediaan Komponen Instalansi	Rp 95.500.000	Tersedianya komponen	4 Item	4 Item	1	1	1	1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Laporan kinerja tersebut sekaligus bentuk pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja dari sasaran yang terdiri dari input, output dan outcome. Indikator kinerja beserta target sasaran dan program yang tertuang dalam perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi perjanjian kinerja Tahun 2018 berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari *Input, Output, Outcome, Benefit, dan Impact*. Media pengukuran kinerja terdiri dari :

- **Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan)**
- **Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)**

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

Tabel 8

NO	RENTANG NILAI	KATEGORI	KETERANGAN
1.	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2.	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indicator kinerja
3.	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indicator kinerja
4.	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja

5.	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja
----	--------	----------------	--

Dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya telah diimplementasikan berbagai kegiatan/program dan kebijaksanaan secara sistematis, berkelanjutan dan terukur dengan standar perencanaan yang efektif dan efisien.

Implementasi dari kegiatan/program dan kebijaksanaan tersebut merupakan pertanggung jawaban kinerja untuk menggambarkan kondisi riil kinerja Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya selama satu tahun anggaran 2018.

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).

Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan dikelompokkan ke dalam :

- Kelompok indikator *inputs* (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.
- Kelompok indikator *outputs* (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
- Kelompok indikator *outcomes* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, *outcomes*

merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

- Kelompok indikator *benefits* (manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- Kelompok indikator *impacts* (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membanding antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang telah di capai, dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator output maupun indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Dengan demikian kita dapat melihat terhadap terjadinya celah kinerja dilakukan dengan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Dalam rangka mengukur capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasi pencapaiannya dengan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Target (Rencana)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

A.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Renstra dan Renja Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya, maka dilakukan pengukuran untuk mengetahui tingkat capaian keberhasilan dan kegagalan dari sasaran indikator yang akan dicapai, dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 9

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya produk-produk kebijakan	Persentase Produk Hukum Daerah (legislasi)	100 (8 Perda)	91,85 (10 Perda)	91,85	Sangat Berhasil

Capaian kinerja pelayan Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya, berdasarkan indikator kinerja utama sesuai kewenangan tugas dan fungsi untuk tahun 2018 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya yaitu “***Menjadikan Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya yang Profesional dan Akuntabel sebagai Unsur Pendukung Tugas dan Fungsi DPRD***”

Berdasarkan dengan dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya memiliki 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) Indikator Sasaran yang terdiri dari 1 (satu) Program Prioritas serta 5 (lima) Program Pendukung dan 52 Kegiatan.

Pencapaian Kinerja Pelayan Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya tahun 2018 diatas, dapat dijelaskan dengan 1 (satu) indikator sebagai berikut :

Persentase produk hukum daerah dengan target 100% tahun 2018, dengan realisasi capaian 91,85%, hal ini diakibatkan karena terdapat beberapa kegiatan pencapaian realisasi masih rendah, sehingga mempengaruhi perhitungan realisasi. Secara umum target perda yang ditetapkan sebanyak 8 (delapan) perda terealisasi sebanyak 10 (sepuluh) perda, pelaksanaan ini sesuai tupoksi dilaksanakan oleh bagian Perundang-undangan dan didukung oleh bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan serta bagian umum dan keuangan.

Tabel 10

**Pencapaian Indikator kegiatan untuk mencapai target indikator sasaran
“Meningkatnya Produk-produk Kebijakan” dapat dilihat dibawah ini :**

NO	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIAN KINERJA (%)	KATEGORI
			TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase Produk Hukum Daerah	%	100	91,85	91,85%	<i>Sangat Berhasil</i>
1	Tersedianya Perda Kota Palangka Raya	Ranperda	8	10	125%	
2	Terpenuhinya Kegiatan Rapat - rapat DPRD	Rapat	70	75	107,14%	
3	Jumlah reses yang dilaksanakan	Kali	3	3	100%	
4	Tersedianya Dana Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Orang/trip	173	76	43,93%	
5	Tersedianya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Orang/trip	50	43	86,00%	
6	Tersedianya Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Kali	3	4	133,33%	
7	Tersedianya Pelaksanaan Evaluasi Perda	Perda	7	8	114%	
8	Tersedianya Raperda yang akan disusun	Ranperda	5	5	100%	
9	Tersedianya Publikasi Peraturan Perundang - Undangan	Bulan	12	12	100%	
10	Tersedianya Raperda yang dikaji keserasiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Dokumen	14	14	100%	
11	Tersedianya check kesehatan awal untuk anggota DPRD	Anggota DPRD	30	13	43,33%	
12	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi dan Pakar DPRD Kota Palangka Raya	OB	156	144	92,31%	
13	Terlaksananya Kunjungan Kerja DPRD Ke Luar Daerah	Kegiatan	40	40	100,00%	

14	Tersedianya Belanja Rumah Tangga dan penunjang kegiatan Unsur Pimpinan DPRD	Bulan	12	12	100,00%	
15	Tersedianya Laporan Risalah Rapat dan Fasilitas Rapat	Risalah	40	45	112,50%	
16	Tersedianya Rapat Badan Musyawarah	Dokumen Rapat Badan Musyawarah	9	11	122,22%	
17	Tersedianya Rapat Badan Kehormatan	Rapat Badan Kehormatan	3	1	33,33%	
18	Tersedianya dana pelantikan PAW Anggota DPRD dan Pelantikan Kepala Daerah Kota Palangka Raya	Pelantikan	3	3	100,00%	
19	Tersedianya dana pertemuan nasional/regional bagi pimpinan dan anggota dprd	Pertemuan	10	10	100,00%	
20	Tersedianya penganggaran APBD 2018 serta penetapannya	Kegiatan	5	5	100,00%	
21	Tersedianya Rapat Pengawasan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan	Kali Rapat	4	4	100,00%	

Analisis pencapaian indikator sasaran :

1. Tersedianya Perda Kota Palangka Raya target 8 (delapan) Perda terealisasi 10 (sepuluh) Perda dengan capaian kinerja 125%. Target Perda ini masuk dalam Indikator Utama RPJMD Perubahan Kota Palangka Raya.

Peraturan Daerah merupakan produk Hukum yang dibahas dan disepakati antaran legislatif dan eksekutif. Bentuk dari Raperda ini terdiri dari dua macam, yakni Raperda yang disampaikan oleh pihak Pemerintah Daerah dan Raperda Inisiatif DPRD. Adapun proses pembuatan Raperda menjadi Perda adalah sebagai berikut : Draf Raperda disampaikan pemerintah daerah atau pengusul raperda inisiatif DPRD ke DPRD. Kemudian dipelajari oleh Bapemperda/Banleg DPRD. Setelah itu disetujui oleh Pimpinan DPRD untuk dibahas, kemudian dimasukkan ke Banmus untuk di jadwalkan dalam pembahasan Raperda. Dalam pembahasan Raperda dalam bentuk Pansus bersama Tim Raperda Pemerintah Daerah di

lanjutkan dengan Kunjungan Kerja ke Daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah yang sama dengan Raperda yang di bahas setelah itu di adakan Rapat Finalisasi Raperda dengan Tim Raperda Pemerintah Daerah dan disetujui dengan perbaikan-perbaikan sesuai dengan hasil pembahasan di lanjutkan dengan Rapat Paripurna Persetujuan DPRD terhadap Raperda yang di bahas. Ini merupakan perwujudan dari *fungsi Legislasi* yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama-sama Kepala Daerah. Dengan acuan tersebut Sekretariat DPRD Kota Palangka Palangka Raya telah berhasil dalam merealisasikan 10 (sepuluh) perda dari yang ditargetkan sebanyak 8 (delapan) dengan capaian kinerja 125% dengan kategori **sangat berhasil**.

2. Terpenuhinya Kegiatan Rapat - rapat DPRD target 70 (tujuh puluh) kali rapat, terealisasi 75 (tujuh puluh lima) kali rapat dengan capaian kinerja 107,14% Kegiatan Rapat Paripurna DPRD merupakan implementasi dari tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang dijabarkan dalam PP nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan peraturan DPRD tentang Tata tertib DPRD. Adapun Jenis Rapat Paripurna itu meliputi : Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa, Rapat Paripurna Intern Dewan, Rapat Banggar. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut melampaui target disebabkan karena rapat yang dilaksanakan diluar jadwal yang telah ditetapkan dengan demikian realisasi target melampaui target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja masuk dalam kategori **sangat berhasil**.

3. Jumlah reses yang target 3 (tiga) kali terealisasi 3 (tiga) kali rapat dengan capaian kinerja 100%

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 BAB VIII Pasal 5 dinyatakan Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Anggota DPRD Sekretariat DPRD Kota Palangaka Raya melakukan kegiatan reses tiga kali setahun selama pada Bulan April, Agustus dan Desember mengunjungi daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD Kota Palangka Raya, guna menyerap dan menghimpun aspirasi yang berkembang di masyarakat. Laporan kegiatan reses anggota DPRD disampaikan

kepada Pimpinan DPRD melalui Rapat Paripurna Intern Dewan. Laporan hasil reses yang telah di Paripurnakan dibawa dalam forum Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan kerja (Renja) SKPD. Dalam pencapaian kinerja tersebut dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan capain kinerja melebihi target yang ditetapkan dengan kategori **sangat berhasil**

4. Jumlah kunjungan kerja dalam Daerah 173 (seratus tujuh puluh tiga) orang/trip dengan capaian kinerja 76 (tujuh puluh enam) orgn/trip dengan capaian kinerja 43,93%

Disini terlihat capain kinerja 43,93% masuk dalam kategori tidak berhasil hal ini disebabkan karena belum terdapatnya rencana kerja DPRD yang mengukur kinerja DPRD dan untuk kunjungan kerja dalam daerah setiap komisi-komisi dilaksanakan sesuai dengan pengaduan masyarakat yang diterima dan hasil rapat Komisi. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan dengan kategori **tidak berhasil**.

5. Tersedianya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD target 50 (lima puluh) org trip terealisasi 43 (empat puluh tiga) dengan capaian kinerja 86%

Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD. Kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, menambah wawasan dan pengetahuan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk workshop dan studi komperatif sesuai dengan bidang tugas masing-masing komisi. Di sini terlihat semua anggota DPRD telah mengikuti kegiatan tersebut dan pecapain indikator kinerja masuk kategori **cukup berhasil**

6. Tersedianya Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan tagert 4 (empat) kali sosialisasi, terealisasi 5 (lima) kali sosialisasi dengan capaian kinerja 133,33%

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ini adalah kegiatan yang diikuti oleh Anggota DPRD Kota Palangka Raya untuk mengikuti Sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk

mensosialisasikan kegiatan dan Produk-produk DPRD yang dihasilkan selama tahun anggaran 2018, capaian kinerja masuk dalam kategori **sangat berhasil**

7. Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Perda target 7 (tujuh) perda terealisasi 8 (delapan) Perda dengan capaian kinerja 114%

Pelaksanaan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakan wajib dilakukan evaluasi, karena hal ini bertujuan untuk mengetahui kegagalan dan keberhasilan pelaksanaan perda tersebut, hal ini merupakan implementasi dari fungsi Pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah/Kota, sehingga realisasi evaluasi target perda melampaui target yang ditetapkan capaian kinerja ini masuk dalam kategori **sangat berhasil**

8. Tersedianya Raperda yang akan disusun target 5 (lima) Ranperda, realisasi 5 (lima) Ranperda capaian kinerja 100%

Ranperda yang ditargetkan telah terealisasi sesuai target yang ditetapkan capaian kinerja ini masuk dalam kategori **sangat berhasil**

9. Tersedianya Publikasi Peraturan Perundang – Undangan target 12 bulan, realisasi 12 bulan, capaian kinerja 100%

Publikasi peraturan perundang-undangan rutin dilakukan selama waktu 12 bulan, capaian kinerja ini masuk dalam kategori **sangat berhasil**

10. Tersedianya Raperda yang dikaji keserasiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku target 14 (empat) belas dokumen, terealisasi 14 (empat) belas dokumen, capaian kinerja 100%

Disini terlihat target yang telah ditetapkan terealisasi sesuai dengan target, sehingga pencapaian kinerja masuk dalam kategori capaian kinerja **sangat berhasil**

11. Tersedianya check kesehatan awal untuk anggota DPRD target 30 (tiga puluh) orang, terealisasi 13 (tiga) belas orang, dengan capaian kinerja 43,33%

Capaian kinerja termasuk dalam kategori tidak berhasil, disini terlihat hanya 13 (tiga belas) orang anggota DPRD yang mengikuti dan sebanyak 17 (tujuh belas) anggota DPRD yang tidak mengikuti medical check dikarenakan ada sebagian anggota DPRD yang memiliki jadwal kegiatan yang berbenturan dengan jadwal

medical check up dan tidak bisa dijadwalkan kembali karena padatnya jadwal Banmus, capain kinerja ini masuk dalam kategori **tidak berhasil**

12. Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi dan Pakar DPRD Kota Palangka Raya target 156 (seratus lima puluh enam) orang/bulan, terealisasi 144 (seratus empat puluh empat) dengan capaian kinerja 92,31%

Dalam menjalankan tugas tri fungsi DPRD, unsur pimpinan dan anggota DPRD dan komisi memerlukan pakar atau tim ahli untuk membantu, mengkaji dan mencermati peraturan daerah yang akan dibuat dan dibahas dengan pihak eksekutif sebelum menjadi perda, ataupun permasalahan lainnya yang berkaitan dengan tri fungsi anggota DPRD. Sehingga diperlukan tenaga ahli. Melihat capaian kinerja diatas maka capaian kinerja masuk dalam kategori **cukup**

13. Terlaksananya Kunjungan Kerja DPRD Ke Luar Daerah target 40 (empat) kegiatan, terealisasi 40 (empat) puluh kegiatan dengan capaian kinerja 100%

Kunjungan kerja pimpinan dan komisi-komisi ke luar daerah dilaksanakan dalam rangka peningkatan pemahaman dan wawasan pimpinan dan komisi-komisi sesuai dengan bidang tugas dan ruang lingkup tugas masing-masing komisi-komisi. Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2018 kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan komisi-komisi ke luar daerah realisasi 100% capaian kinerja masuk dalam kategori **sangat berhasil**.

14. Tersedianya Belanja Rumah Tangga dan penunjang kegiatan Unsur Pimpinan DPRD target 12 (dua belas bulan) terealisasi 12 (dua belas) bulan dengan capain kinerja 100%

Belanja rumah tangga unsur pimpinan DPRD dilaksanakan dalam rangka untuk menunjang kinerja unsur Pimpinan DPRD dengan terealisasi sebanyak 12 bulan dengan capaian 100% masuk dalam kategori **sangat berhasil**

15. Tersedianya Laporan Risalah Rapat dan Fasilitasi Rapat target 40 (empat puluh) risalah, terealisasi 45 (empat puluh lima) risalah, dengan capaian kinerja 112,50%, termasuk dalam kategori **sangat berhasil**

16. Tersedianya Rapat Badan Musyawarah target 9 (sembilan) dokumen rapat risalah terealisasi 11 (sebelas) dokumen rapat risalah dengan capaian kinerja 122,22% termasuk dalam kategori **sangat berhasil**

17. Tersedianya Rapat Badan Kehormatan target 3 (tiga) kali rapat, terealisasi 1 (satu) kali rapat dengan capain kinerja 33,33%.
- Dalam pelaksanaan kegiatan ini yang menyebabkan capaian kinerja tidak berhasil dikarena terdapat belanja perjalanan dinas dan rapat dalam rangka menunjang kinerja badan kehormatan, disini belum tepatnya target yang ditetapkan, sehingga perlu formulasi dalam menentukan target kinerja untuk tahun kedepan. capain kinerja masuk dalam kategori **tidak berhasil**
18. Tersedianya dana pelantikan PAW Anggota DPRD dan Pelantikan Kepala Daerah Kota Palangka Raya target 3 (tiga) kali pelantikan, terealisasi 3 (tiga) kali pelantikan dengan capaian kinerja 100%, termasuk dalam kategori **sangat berhasil**
19. Tersedianya dana pertemuan nasional/regional bagi pimpinan dan anggota DPRD target 10 (sepuluh) pertemuan, terealisasi 10 (sepuluh) kali pertemuan dengan capaian kinerja 100% termasuk dalam kategori **sangat berhasil**
20. Tersedianya penganggaran APBD 2018 serta penetapannya target 5 (lima) kegiatan, terealisasi 5 (lima) kegiatan dengan capaian kinerja 100%, ini merupakan fungsi anggaran yang diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama Kepala Daerah, ini termasuk dalam kategori **sangat berhasil**
21. Tersedianya Rapat Pengawasan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan target 4 (empat) kali rapat, terealisasi 4 (empat) kali rapat, dengan capaian kinerja 100%, termasuk dalam kategori **sangat berhasil**

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran tersebut di atas, dengan capaian 91,85% masuk dalam kategori **sangat berhasil**. Dengan demikian diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran output yang ditetapkan tercapai dengan baik, secara tidak langsung indikator outcome yang inginkan berhasil dengan baik sehingga berdampak kepada masyarakat di Kota Palangka Raya terhadap Peraturan-Peraturan Daerah yang ditetapkan atau di Perdakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka mencapai program pembangunan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Palangka Raya.

Capaian Indikator Proram/Kegiatan pendukung dalam rangka pencapaian program prioritas dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 11

NO	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2018		CAPAIN KINERJA (%)	KATEGORI
			TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	12
	Dukungan Administrasi yang Tepat Waktu	%	95	92,25	97,10%	<i>Sangat Berhasil</i>
1	Jumlah surat yang diproses	Surat	2000	2000	100%	
2	Tersedianya pembayaran penunjang pelayanan administrasi	Bulan	12	12	100%	
3	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kegiatan	5	5	100%	
4	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Bulan	12	12	100%	
5	Tersedianya dana guna pembayaran Jasa Tenaga Kontrak/ Pegawai Harian Lepas	OB	564	516	91,49%	
6	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	100%	
7	Tersedianya jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kegiatan	5	5	100%	
8	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan	12	12	100%	
9	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	Bulan	12	12	100%	
10	Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan kantor	Item	4	4	100%	
11	Tersedianya makanan dan minuman yang diperlukan	Bulan	12	12	100%	

12	Tersedianya dana untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Orang	85	88	103,53%	
13	Tersedianya dana untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Orang	90	71	78,89%	
14	Tersedianya Stand Pameran pada Palangka Fair 2018	Kegiatan	1	1	100,00%	
15	Tersedianya Jasa Publik Media	Item/Tahun	288	276	95,83%	
16	Tersedianya Dana Kehumasan dan Protokol	Kegiatan	140	143	102,14%	
	Dukungan Teknis yang Prima	%	95	94,45	99,42%	<i>Sangat Berhasil</i>
17	Tersedianya peralatan Rumah Jabatan / Dinas	item	3	3	100%	
18	Tersedianya peralatan Gedung Kantor	set	1	1	100%	
19	Tersedianya sarana dan prasarana Mebeleur	item	4	4	100%	
20	Tersedianya lahan pembangunan sarana perkantoran	Kegiatan	1	1	100%	
21	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /berkala Rumah Jabatan	Bulan	12	12	100%	
22	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	Bulan	12	12	100%	
23	Tersedianya Dana Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan	Kegiatan	3	3	100%	
24	Tersedianya Dana Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor (Gudang Genset)	Kegiatan	1	1	100%	
25	Tersedianya Sarana dan prasarana kantor	Unit	3	3	100%	

26	Tersedianya Pakaian Dinas Anggota DPRD	stel	160	160	100%	
	Dukungan Keahlian yang Akurat	%	95	95,51	100,54%	<i>Sangat Berhasil</i>
27	Tersedianya Dana Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang	75	78	104%	
28	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	3	3	100%	
29	Tersedianya Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan	Laporan	19	19	100%	
30	Tersedianya Dokumen Program dan Rencana Kerja	Dokumen	5	5	100%	
31	Tersedianya Laporan Inventaris Barang Milik Daerah	Dokumen	4	4	100%	

Dari capain indikator program/kegiatan pendukung diatas rata-rata diatas 97% keatas dengan kategori **sangat berhasil** hal ini karena dilaksanakan sesuai rencana operasional yang telah dijadualkan dan pelaksanaan program/ kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Perundang-undangan, persidangan dan Humas, Bagian Fasilitasi Panganggaran dan Pengawasan dalam rangka menunjang pelaksanaan program prioritas untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

A.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;

Tabel 12

Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun lalu

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Kondisi awal tahun 2013	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Produk Hukum Daerah (legislasi)	Persen		25	15	20	20	20	67,50	45	47,50	20	25
			4	6	6	8	8	8	27	18	19	8	10
			Perda	Perda	Perda	Perda	Perda	Perda	Perda	Perda	Perda	Perda	Perda

Analisis :

1. Tahun 2014 dengan Prolegda sebanyak 22 (dua puluh dua) buah dan diluar prolegda ada 7 (tujuh) buah, sedangkan Raperda yang disetujui untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah berjumlah 27 (dua puluh tujuh) buah;
2. Tahun 2015 dengan Prolegda sebanyak 21 (dua puluh satu) buah dan diluar Prolegda 2 (dua) buah, sedangkan Raperda yang disetujui untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah berjumlah 18 (delapan belas) buah.
3. Tahun 2016 dengan Prolegda sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah, sedangkan Raperda yang disetujui untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah berjumlah 19 (sembilan belas) buah.
4. Tahun 2017 dengan Prolegda sebanyak 8 (delapan) buah, sedangkan Raperda yang disetujui untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah berjumlah 8 (delapan) buah yang berasal dari Prolegda Tahun 2016 yang telah disahkan di Tahun 2017.
5. Tahun 2018 dengan Prolegda sebanyak 14 (empat belas) buah, sedangkan sebanyak 5 (lima) buah tidak diperdakan hal ini akibat tidak dibahas karena instansi yang mengusulkan tidak menyampaikan draf peraturan daerah ke DPRD Kota Palngaka Raya, sedangkan 1 (satu) buah peraturan daerah yang dibahas yaitu tunggakan Prolegda tahun 2016 tentang peraturan daerah Perpustakaan jadi

yang disetujui untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah berjumlah 10 (sepuluh) buah.

Jadi bila melihat perbandingan dari tahun ke tahun kita tidak bisa mengambil patokan dari Prolegda yang diusulkan saja namun harus melihat kembali dari kelengkapan berkas seperti naskah akademik serta regulasi yang ada pada saat pembahasan raperda dilakukan.

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis.

REALISASI DAN TARGET KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PALANGKA RAYA
YANG MENGACU PADA RPJMD PERUBAHAN TAHUN 2013-2018

Tabel 13

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE KONDISI RPJMD (2013)	TARGET s/d TAHUN 2018					CAPAIAN s/d TAHUN 2018					TARGET KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	CAPAIAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatnya produk-produk kebijakan	Persentase Produk Hukum Daerah (legislasi)	Persen	(4 perda)	25 (6 Perda)	15 (6 Perda)	20 (8 Perda)	20 (8 Perda)	20 (8 Perda)	67,50 (27 Perda)	45,00 (18 Perda)	47,50 (19 Perda)	20,00 (8 Perda)	25,00 (10 Perda)	100 (40 Perda)	205 (82 Perda)

Dari tabel diatas tergambar bahwa Indikator Tujuan yang di ingin dicapai dikondisi kinerja pelayanan pada akhir periode RPJMD Perubahan 2013 - 2018 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palangka Raya, dengan Indikator Tujuan : (Jumlah Perda yang dihasilkann dibagi jumlah usulan Perda) x 100 %

$$\frac{82 \text{ Perda}}{40 \text{ Perda}} \times 100\% = 205\%$$

Dengan demikian pencapaian persentase Indikator Tujuan pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 205 % (dua ratus lima persen) dengan kategori *sangat berhasil*.

A.4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan kinerja adalah:

1. Adanya komitmen bersama dan kerjasama seluruh pihak dilingkungan sekretariat DPRD dalam pelaksanaan kegiatan.

Hambatan/ masalah yang dihadapi:

1. Kurangnya sumber daya aparatur yang handal dan kompeten dan penempatan staf yang tidak tepat sesuai latar belakang pendidikan.
2. Keterlambatan penetapan peraturan daerah yang disebabkan hal – hal tertentu diluar kewenangan sekretariat DPRD seperti adanya jadwal mendadak anggota dewan
3. Pelaksanaan kegiatan reses dalam upaya penampungan aspirasi masyarakat masih belum optimal.
4. Terjadinya perbedaan pendapat dalam rapat sehingga perlu dilaksanakan beberapa kali dengar pendapat dengan masyarakat terhadap substansi Ranperda.

Solusi alternative yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD dalam meningkatkan pelayanan kepada Anggota DPRD perlu untuk dilaksanakan strategi berikut :

1. Merangkul seluruh stakeholder/pihak – pihak terkait di lingkungan Sekretariat DPRD untuk bekerja secara professional tanpa melibatkan Anggota DPRD dalam penyelesaian masalah yang terkait pekerjaan.
2. Penempatan Sumber daya sesuai dengan kompetensi yang bersangkutan
3. Diupayakan pada saat pembahasan ranperda dapat dilaksanakan tepat waktu dan Anggota Dewan telah difasilitasi dengan aturan – aturan dan informasi terbaru terkait ranperda yang akan dibahas.
4. Diupayakan pelaksanaan kegiatan reses dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran sehingga aspirasi masyarakat dapat terwakili.

5. Komitmen bersama terhadap disiplin pelaksanaan waktu rapat, untuk menghindari keterlambatan pelaksanaan rapat /pembahasan ranperda

A.5 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA :

I. Sumber Daya Manusia

Rincian sumber daya manusia (SDM) pada Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya per 31 Desember 2018, sebagai berikut :

- a. Menurut Golongan Ruang/ Kepangkatan:

- Golongan IV: 5 orang
- Golongan III: 22 orang
- Golongan II : 4 orang
- Golongan I : 0 orang

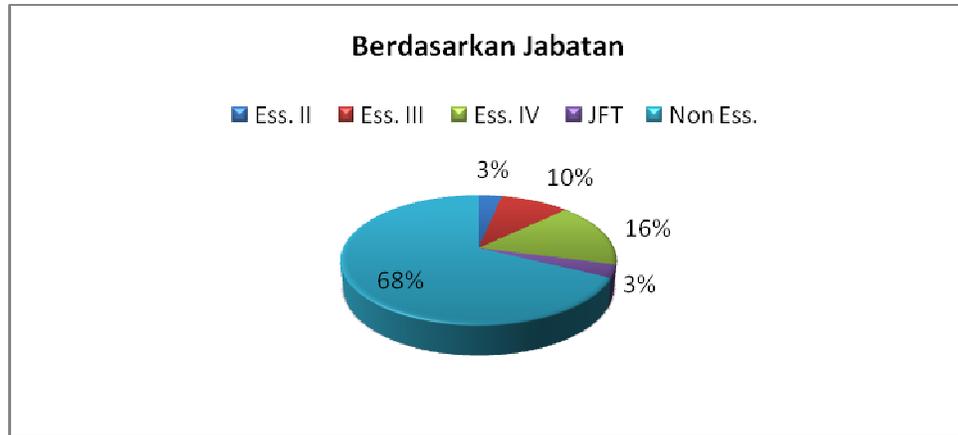


- b. Berdasarkan Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	S2	7 ORANG	22,6
2.	S1	18 ORANG	58,1
3.	D3	-	-
4.	SLTA	5 ORANG	16,1
5.	SLTP	1 ORANG	3,2
6.	SD	-	-

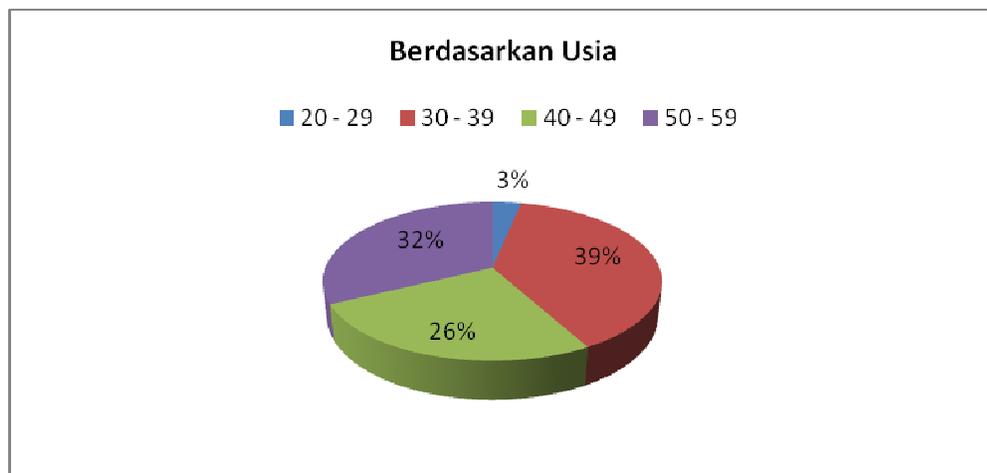
c. Berdasarkan Jabatan

- Esselon II : 1 orang
- Esselon III : 3 orang
- Esselon IV : 5 orang
- JFT : 1 orang
- Non Esselon : 21 orang



d. Berdasarkan usia

- Usia 20 – 29 tahun : 1 orang
- Usia 30 – 39 tahun : 12 orang
- Usia 40 – 49 tahun : 8 orang
- Usia 50 – 59 tahun : 10 orang



A.6. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja :

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dari program tersebut diatas terdapat beberapa kegiatan yang belum tercapai kinerjanya yaitu kegiatan :

1. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah indikator output Jumlah Kunjungan kerja dalam Daerah 173 (seratus tujuh puluh tiga) orang/trip dengan capaian kinerja 76 (tujuh puluh enam) orgn/trip dengan capaian kinerja 43,93%, dengan kategori **tidak berhasil**.
2. Medical Check Up Anggota DPRD indikator output tersedianya check kesehatan awal untuk anggota DPRD target 30 (tiga puluh) orang, terealisasi 13 (tiga) belas orang, dengan capaian kinerja 43,33%, dengan kategori **tidak berhasil**.
3. Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan indikator output Tersedianya Rapat Badan Kehormatan target 3 (tiga) kali rapat, terealisasi 1 (satu) kali rapat dengan capain kinerja 33,33%, capain kinerja masuk dalam kategori **tidak berhasil**.

Solusi untuk mengatasi permasalahan pencapaian kinerja kegiatan tersebut :

1. Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah yaitu dengan membuat rencana kerja (renja) anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, serta berperan aktif memfasilitasi pertemuan-pertemuan dengan masyarakat.

2. Medical Check Up Anggota DPRD yaitu akan mengkondisikan jadwal check up dengan sebaik mungkin dan menghindari terjadi benturan kegiatan-kegiatan yang telah dijadwalkan banmus untuk pelaksanaan medical check up anggota DPRD.
3. Kegiatan Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan sebenarnya target kinerja terealisasi baik, tetapi disini target yang ditetapkan belum sesuai pengukurannya karena di dalam kegiatan tersebut terdapat belanja perjalanan dinas yang menunjang kegiatan badan kehormatan. Sedangkan yang menjadi tolak ukur capaian indikator output berupa jumlah rapat yang dilaksanakan. Kalau dilihat dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 208.825.400,00 dengan realisasi serapan anggaran 206.155.267,00 atau 98,72%. Untuk kedepan akan diformulasikan indikator output yang jelas untuk kegiatan peningkatan kinerja badan kehormatan agar dapat dengan mudah diukur pencapaian indikator pencapaian kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SOPD Tahun 2018 Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Perubahan maka akan diuraikan seluruh anggaran Belanja Langsung baik itu pagu anggaran maupun realisasinya yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, yaitu :

Tabel 14

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
	BELANJA			
	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
	- BELANJA DPRD	15.900.000.000,00	15.503.070.624,00	97,50%
	- BELANJA SEKRETARIAT DPRD	2.640.668.734,00	2.468.298.148,00	93,47%

	BELANJA LANGSUNG			
	- BELANJA LANGSUNG	24.312.892.000,00	22.308.363.411,50	91,76%
	JUMLAH BTL DAN BL	42.853.560.734,00	40.279.732.183,50	93,99%
	Rincian Belanja Langsung			
	Program / Kegiatan			
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			
	Pembahasan Rancangan Perda	1.360.235.000	1.353.323.357	99,49%
	Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan dan Rapat Paripurna	524.605.000	478.771.900	91,26%
	Kegiatan Reses	265.425.000	237.174.650	89,36%
	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah	35.800.000	9.325.000	26,05%
	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	720.550.000	628.394.844	87,21%
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	70.820.000	59.915.500	84,60%
	Evaluasi pelaksanaan perda pemerintah kota palangka Raya	43.715.000	36.973.900	84,58%
	Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan	337.387.100	324.574.580	96,20%
	Publikasi peraturan perundang-undangan	50.935.000	46.795.800	91,87%
	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan Perundang-undangan Daerah	397.865.000	396.149.297	99,57%
	Medical Check Up Anggota DPRD	59.350.000	20.800.000	35,05%
	Penyedia Jasa Operasional Tenaga Ahli DPRD	396.000.000	321.000.000	81,06%
	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah	4.504.000.000	4.486.844.165	99,62%

	Peningkatan Kinerja Pimpinan DPRD	1.214.250.000	1.128.452.717	92,93%
	Peningkatan kinerja risalah dan rapat	64.450.000	64.308.250	99,78%
	Penyusunan Program kerja dan Evaluasi kinerja legislatif	1.315.250.000	1.313.969.079	99,90%
	Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan	208.825.000	206.155.267	98,72%
	Pelantikan Anggota DPRD	156.825.400	145.245.800	92,62%
	Pertemuan Nasional/Regional Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	712.600.000	693.841.434	97,37%
	Tahapan Penganggaran APBD Serta Penetapannya	1.447.500.000	1.447.446.599,50	100,00%
	Penguatan Pengawasan Atas Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	43.159.800	16.070.000	37,23%
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.575.000	22.470.000	95,31%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	344.000.000	205.738.161	59,81%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	138.500.000	71.865.000	51,89%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas	402.800.000	348.606.218	86,55%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.210.000.000	924.396.555	76,40%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	240.200.000	234.568.300	97,66%
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	96.800.000	58.015.000	59,93%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	82.000.000	81.960.200	99,95%
	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	379.039.000	290.240.000	76,57%
	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / penerangan bangunan kantor	95.500.000	60.500.000	63,35%

	Penyediaan Makanan dan minuman	789.493.500	754.073.500	95,51%
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	400.000.000	396.468.514	99,12%
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	36.000.000	9.975.000	27,71%
	Penyediaan jasa event Palangka Raya Fair	88.770.000	88.470.000	99,66%
	Penyediaan Jasa Publikasi surat kabar dan majalah	2.945.160.000	2.863.739.500	97,24%
	Kegiatan kehumasan dan protokol	201.437.000	196.401.050	97,50%
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	Pengadaan peralatan Rumah Jabatan / Dinas	35.000.000	34.872.200	99,63%
	Pengadaan peralatan gedung kantor	69.000.000	68.904.000	99,86%
	Pengadaan Mebeleur	146.500.000	146.350.000	99,90%
	Pengadaan Tanah	400.000.000	26.725.000	6,68%
	Pemeliharaan rutin/ berkala Rumah Jabatan	120.000.000	110.009.500	91,67%
	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	100.000.000	78.037.000	78,04%
	Rehabilitasi sedang / berat Rumah Jabatan	50.000.000	34.875.000	69,75%
	Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor	145.000.000	144.500.000	99,66%
	Pengadaan AC	63.000.000	62.820.000	99,71%
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	438.150.000	387.564.000	88,45%
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			

	Pendidikan dan Pelatihan Formal	668.500.000	647.125.895	96,80%
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPRD	104.170.000	86.247.500	82,79%
	Penyusunan Pelaporan Keuangan	476.480.200	381.960.929	80,16%
	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	25.500.000	24.868.550	97,52%
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	68.770.000	46.369.200	67,43%

Dari total anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun 2018 diatas terlihat penyerapan anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara keseluruhan Rp. 40.279.732.183,50 atau sebesar 93,99%.

BAB IV

PENUTUP

A. SARAN

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya sebagai salah satu bagian dari Pemerintah Kota Palangka Raya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan mendorong terciptanya tiga hubungan harmonis antara Sekretariat DPRD dengan anggota DPRD, antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan Daerah serta Sekretariat DPRD dengan masyarakat.

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut diatas telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja di lingkup Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya di masa mendatang. Sesuai analisis capaian kinerja tersebut maka sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas tahun kedepan :

1. Hendaknya adanya sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik lagi terutama untuk jadwal pelaksanaan kegiatan baik dari Pemerintah Kota Palangka Raya dengan jadwal DPRD Kota Palangka Raya, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik tanpa berbenturan supaya penyerapan anggaran dapat tercapai sesuai yang direncanakan dan penyelesaian Persentase Produk Hukum Daerah (legislasi) dapat selesai tepat waktu.
2. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di lingkungan Sekretariat DPRD
3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di Sekretariat DPRD akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

4. Hendaknya Sumber Daya Manusia (SDM) terutama ASN Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya, dapat lebih profesional dan selalu meningkatkan kompetensinya baik melalui pelatihan maupun secara intensif mencari informasi baik melalui internet, buku, media massa, dan sebagainya.
5. Hendaknya kedepannya dukungan teknis dalam pembuatan produk hukum daerah terutama Perda benar-benar harus lebih sinergitas baik dari Pemerintah, masyarakat serta DPRD sehingga produk hukum tersebut lebih mengena pada masyarakat dan dapat dijalankan dengan baik.
6. Lebih meningkatkan pemahaman dan wawasan Anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya baik melalui pelatihan/bimtek/workshop, kunjungan kerja, studi banding, dan sosialisasi sehingga mencegah terjadinya konflik internal dan eksternal.

B. Kesimpulan

Dari keseluruhan sasaran yang telah diukur telah memenuhi capaian target sasaran pada tahun 2018 dan hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya untuk mewujudkan Visi dan Misi. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Kota Palangka Raya

Sebagai bagian penutup dari LKIP Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2018 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya memberikan gambaran bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja pada Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin aparatur. Oleh karena itu perlu kesungguhan dan komitmen terhadap pelaksanaan program dan kegiatan agar sasaran yang menjadi target mendapat hasil yang optimal dan dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Palangka Raya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Instansi Kinerja Tahun 2018 ini dibuat sebagai bahan laporan kinerja dan evaluasi untuk peningkatan kinerja di Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya di tahun-tahun yang akan datang, terima kasih.

Palangka Raya, April 2018

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA PALANGKA RAYA,



Dra. SITTI MASMAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630324 199103 2 010

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur,

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja pada Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketasatan dan disiplin aparatur. Oleh karena itu perlu kesungguhan dan komitmen terhadap pelaksanaan program dan kegiatan agar sasaran yang menjadi target mendapat hasil yang optimal dan dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Palangka Raya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Instansi Kinerja Tahun 2018 ini dibuat sebagai bahan laporan kinerja dan evaluasi untuk peningkatan kinerja di Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya di tahun-tahun yang akan datang, terima kasih.

Palangka Raya, April 2018

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA PALANGKA RAYA,



Dra. BITI MASMAH
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19630324 199103 2 010

LAMPIRAN - LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

TAHUN 2018

Instansi : SEKRETARIAT DPRD KOTA PALANGKA RAYA

NO	PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)			% Penc. Renc. Tk. Capaian	KETERANGAN
							8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Pembahasan Rancangan Perda	Input : Jumlah Dana	Rp.	1.360.235.000	1.353.323.357	99,49%	33,16%	108,16%	91,85%	
			Output : Tersedianya Perda Kota Palangka Raya	Ranperda	8	10	125%	41,67%			
			Outcome : Meningkatkan Legalitas Produk Hukum Daerah	%	20	20	100%	33,33%			
		Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan dan Rapat Paripurna	Input : Jumlah Dana	Rp.	524.605.000	478.771.900	91,26%	30,42%	101,85%		

		Kegiatan Reses	Output :	Terpenuhinya Kegiatan Rapat - rapat DPRD	Rapat	70	75	107,14%	35,71%			
			Outcome :	Meningkatnya Legalitas untuk Produk Hukum Daerah	Rapat	70	75	107,14%	35,71%			
			Input :	Jumlah Dana	Rp.	265.425.000	237.174.650	89,36%	29,79%	96,45%		
		Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah	Output :	Tersedianya Dana Reses	Kali	3	3	100%	33,33%			
			Outcome :	Meningkatnya Legalitas untuk Produk Hukum Daerah	Kali	3	3	100%	33,33%			
			Input :	Jumlah Dana	Rp.	35.800.000	9.325.000	26,05%	8,68%			
			Output :	Tersedianya Dana Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Orang/trip	173	76	43,93%	14,64%			
			Outcome :	Meningkatnya Efektivitas Produk Hukum Daerah	Orang/trip	173	76	43,93%	14,64%			
		Peningkatan Kapasitas	Input :	Jumlah Dana	Rp.	720.550.000	628.394.844	87,21%	29,07%	86,40%		

Pimpinan dan Anggota DPRD	Output :	Tersedianya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Orang/trip	50	43	86.00%	28.67%	
	Outcome :	Meningkatnya Efektivitas Produk Hukum Daerah	Orang/trip	50	43	86.00%	28.67%	
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Input :	Jumlah Dana	Rp.	70.820.000	59.915.500	84.60%	28.20%	117,09%
	Output :	Tersedianya Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Kali	3	4	133.33%	44.44%	
Evaluasi pelaksanaan perda pemerintah kota palangka Raya	Output :	Meningkatnya Legalitas Produk Hukum daerah	Kali	3	4	133.33%	44.44%	
	Input :	Jumlah Dana	Rp.	43.715.000	36.973.900	84.58%	28.19%	

Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan	Output :	Tersedianya Pelaksanaan Evaluasi Perda	Perda	7	8	114%	38,10%	
	Outcome :	Meningkatnya Efektivitas dan Legalitas Produk Hukum Daerah	Perda	7	8	114%	38,10%	
	Input :	Jumlah Dana	Rp.	337.387.100	324.574.580	96,20%	32,07%	98,73%
	Output :	Tersedianya Raperda yang akan disusun	Ranperda	5	5	100%	33,33%	
	Outcome :	Meningkatnya Efektivitas dan Legalitas Produk Hukum Daerah	Ranperda	5	5	100%	33,33%	
	Publikasi peraturan perundang-undangan	Input :	Jumlah Dana	Rp.	50.935.000	46.795.800	91,87%	30,62%
Output :		Tersedianya Publikasi Peraturan Perundang - Undangan	Bulan	12	12	100%	33,33%	

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan Perundang-undangan Daerah	Outcome :	Meningkatnya Efektivitas dan Legalitas Produk Hukum Daerah	Bulan	12	12	100%	33,33%	
	Input :	Jumlah Dana	Rp.	397.865.000	396.149.297	99,57%	33,19%	99,86%
	Output :	Tersedianya Raperda yang dikaji keserasiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Dokumen	14	14	100%	33,33%	
	Outcome :	Meningkatkan Legalitas Produk Hukum Daerah	Dokumen	14	14	100%	33,33%	
Medical Check Up Anggota DPRD	Input :	Jumlah Dana	Rp.	59.350.000	20.800.000	35,05%	11,68%	40,57%

Penyedia Jasa Operasional Tenaga Ahli DPRD	Output :	Tersedianya check kesehatan awal untuk anggota DPRD	Anggota DPRD	30	13	43,33%	14,44%	88,56%
	Outcome :	Meningkatnya pencegahan serta deteksi dini penyakit	Anggota DPRD	30	13	43,33%	14,44%	
	Input :	Jumlah Dana	Rp.	396.000.000	321.000.000	81,06%	27,02%	
	Output :	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi dan Pakar DPRD Kota Palangka Raya	OB	156	144	92,31%	30,77%	
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah	Outcome :	Meningkatnya Kinerja Legislatif dan efektivitas produk hukum daerah	OB	156	144	92,31%	30,77%	99,87%
	Input :	Jumlah Dana	Rp.	4.504.000.000	4.486.844.165	99,62%	33,21%	
	Output :	Terlaksananya Kunjungan Kerja DPRD Ke Luar Daerah	Kegiatan	40	40	100,00 %	33,33%	

Peningkatan Kinerja Pimpinan DPRD	Outcome :	Meningkatnya Efektivitas Produk Hukum Daerah	Kegiatan	40	40	100,00 %	33,33%	97,64%
	Input :	Jumlah Dana	Rp.	1.214.250.000	1.128.452.717	92,93%	30,98%	
	Output :	Tersedianya Belanja Rumah Tangga dan penunjang kegiatan Unsur Pimpinan DPRD	Bulan	12	12	100,00 %	33,33%	
Peningkatan kinerja risalah dan rapat	Outcome :	Meningkatnya Efektivitas dan Kinerja Pimpinan DPRD	Bulan	12	12	100,00 %	33,33%	108,26%
	Input :	Jumlah Dana	Rp.	64.450.000	64.308.250	99,78%	33,26%	
	Output :	Tersedianya Laporan Risalah Rapat dan Fasilitasi Rapat	Risalah	40	45	112,50%	37,50%	
	Outcome :	Meningkatnya Efektivitas Produk Hukum Daerah	Risalah	40	45	112,50%	37,50%	
Penyusunan Program kerja dan Evaluasi kinerja legislatif	Input :	Jumlah Dana	Rp.	1.315.250.000	1.313.969.079	99,90%	33,30%	114,78%

Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan	Output :	Tersedianya Rapat Badan Musyawarah	Dokumen Rapat Badan Musyawarah	9	11	122,22%	40,74%	55,13%
	Outcome :	Meningatnya efektivitas kinerja Badan Musyawarah	Dokumen Rapat Badan Musyawarah	9	11	122,22%	40,74%	
	Input :	Jumlah Dana	Rp.	208.825.000	206.155.267	98,72%	32,91%	
Pelantikan Anggota DPRD	Output :	Tersedianya Rapat Badan Kehormatan	Rapat Badan Kehormatan	3	1	33,33%	11,11%	97,54%
	Outcome :	Meningkatnya efektivitas kinerja badan kehormatan	Rapat Badan Kehormatan	3	1	33,33%	11,11%	
	Input :	Jumlah Dana	Rp.	156.825.400	145.245.800	92,62%	30,87%	
	Output :	Tersedianya dana pelantikan PAW Anggota DPRD dan Pelantikan Kepala Daerah Kota Palangka Raya	Pelantikan	3	3	100,00 %	33,33%	

Pertemuan Nasional/Regional Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Outcome :	Meningkatkan efektivitas produk hukum daerah	Pelantikan	3	3	100,00 %	33,33%	99,12%
	Input :	Jumlah Dana	Rp.	712.600.000	693.841.434	97,37%	32,46%	
	Output :	Tersedianya dana pertemuan nasional/regional bagi pimpinan dan anggota dprd	Pertemuan	10	10	100,00 %	33,33%	
	Outcome :	Meningkatnya efektivitas kinerja pimpinan dan anggota DPRD	Pertemuan	10	10	100,00 %	33,33%	
Tahapan Penganggaran APBD Serta Penetapannya	Input :	Jumlah Dana	Rp.	1.447.500.000	1.447.446.599,50	100,00 %	33,33%	100,00 %
	Output :	Tersedianya penganggaran APBD 2018 serta penetapannya	Kegiatan	5	5	100,00 %	33,33%	
	Outcome :	Meningkatnya Efektivitas dan Legalitas Produk Hukum Daerah	Kegiatan	5	5	100,00 %	33,33%	

		Penguatan Pengawasan Atas Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Input : Jumlah Dana	Rp.	43.159.800	16.070.000	37,23%	12,41%	79,08%		
			Output : Tersedianya Rapat Pengawasan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan	Kali Rapat	4	4	100,00 %	33,33%			
			Outcome : Meningkatnya efektivitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Kali Rapat	4	4	100,00 %	33,33%			
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Jumlah Dana	Rp.	23.575.000	22.470.000	95,31%	31,77%	98,44%		
			Output : jumlah surat yang diproses	surat	2000	2000	100,00 %	33,33%			
			Outcome : Meningkatnya administrasi surat menyurat yang diproses	%	20	20	100,00 %	33,33%		92,25%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Jumlah Dana	Rp.	344.000.000	205.738.161	59,81%	19,94%	86,60%		

			Output :	Tersedianya pembayaran penunjang pelayanan administrasi	Bulan	12	12	100%	33,33%			
			Outcome :	Meningkatnya Penunjang Pelayanan Administrasi	Bulan	12	12	100%	33,33%			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input :	Jumlah Dana	Rp.	138.500.000	71.865.000	51,89%	17,30%	83,96%		
			Output :	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kegiatan	5	5	100%	33,33%			
			Outcome :	Meningkatnya kelancaran administrasi Perkantoran	Kegiatan	5	5	100%	33,33%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas	Input :	Jumlah Dana	Rp.	402.800.000	348.606.218	86,55%	28,85%	95,52%		

			Output :	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Bulan	12	12	100%	33,33%			
			Outcome :	Meningkatnya kualitas kendaraan dinas/ operasional	Bulan	12	12	100%	33,33%			
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input :	Jumlah Dana	Rp.	1.210.000.000	924.396.555	76,40%	25,47%	86,46%		
			Output :	Tersedianya dana guna pembayaran Jasa Tenaga Kontrak/ Pegawai Harian Lepas	08	564	516	91,49%	30,50%			
			Outcome :	Meningkatnya kinerja Tenaga Kontrak/ PHL	08	564	516	91,49%	30,50%			
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input :	Jumlah Dana	Rp.	240.200.000	234.568.300	97,66%	32,55%	99,22%		
			Output :	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	100%	33,33%			

			Outcome :	meningkatnya kebersihan lingkungan kantor	Bulan	12	12	100%	33,33%			
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Input :	Jumlah Dana	Rp.	96.800.000	58.015.000	59,93%	19,98%	86,64%		
			Output :	Tersedianya jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kegiatan	5	5	100%	33,33%			
			Outcome :	Meningkatnya Kenyamanan dalam bekerja	Kegiatan	5	5	100%	33,33%			
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input :	Jumlah Dana	Rp.	82.000.000	81.960.200	99,95%	33,32%	99,98%		
			Output :	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan	12	12	100%	33,33%			
			Outcome :	Meningkatnya Kualitas Pelayanan administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	100%	33,33%			
		Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Input :	Jumlah Dana	Rp.	379.039.000	290.240.000	76,57%	25,52%	92,19%		

			Output :	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	Bulan	12	12	100%	33.33%			
			Outcome :	Meningkatnya Kualitas Pelayanan administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	100%	33.33%			
		Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / penerangan bangunan kantor	Input :	Jumlah Dana	Rp.	95.500.000	60.500.000	63.35%	21.12%	87.78%		
			Output :	Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan kantor	Item	4	4	100%	33.33%			
			Outcome :	Meningkatnya penyelesaian pekerjaan administrasi perkantoran	Item	4	4	100%	33.33%			
		Penyediaan Makanan dan minuman	Input :	Jumlah Dana	Rp.	789.493.500	754.073.500	95.51%	31.84%	98.50%		
			Output :	Tersedianya makanan dan minuman yang diperlukan	Bulan	12	12	100%	33.33%			

			Outcome :	Meningkatnya kinerja pelayanan pada sekretariat DPRD Kota Palangka Raya	Bulan	12	12	100%	33.33%			
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Input :	Jumlah Dana	Rp.	400.000.000	396.468.514	99,12%	33,04%	102,06%		
			Output :	Tersedianya dana untuk Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Orang	85	88	103,53%	34,51%			
			Outcome :	Meningkatnya pemahaman akan tupoksi pekerjaan	Orang	85	88	103,53%	34,51%			
		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Input :	Jumlah Dana	Rp.	36.000.000	9.975.000	27,71%	9,24%	61,83%		
			Output :	Tersedianya dana untuk Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Orang	90	71	78,89%	26,30%			

			Outcome :	Meningkatnya pemahaman akan tupoksi pekerjaan	Orang	90	71	78,89%	26,30%			
		Penyediaan jasa event Palangka Raya Fair	Input :	Jumlah Dana	Rp.	88.770.000	88.470.000	99,66%	33,22%	99,89%		
			Output :	Tersedianya Stand Pameran pada Palangka Fair 2018	Kegiatan	1	1	100,00 %	33,33%			
			Outcome :	Meningkatkan keikutsertaan pada pameran Palangka Fair 2018	Kegiatan	1	1	100,00 %	33,33%			
		Penyediaan Jasa Publikasi surat kabar dan majalah	Input :	Jumlah Dana	Rp.	2.945.160.000	2.863.739.500	97,24%	32,41%	96,30%		
			Output :	Tersedianya Jasa Publik Media	Item/Tahun	288	276	95,83%	31,94%			
			Outcome :	Meningkatnya Informasi Publik Media	Item/Tahun	288	276	95,83%	31,94%			
		Kegiatan kehumasan dan protokol	Input :	Jumlah Dana	Rp.	201.437.000	196.401.050	97,50%	32,50%	100,60 %		

			Output :	Tersedianya sarana dan prasarana Mebeleur	item	4	4	100%	33,33%			
			Outcome :	Tersedianya sarana dan Prasarana yang memadai	item	4	4	100%	33,33%			
		Pengadaan Tanah	Input :	Jumlah Dana	Rp.	400.000.000	26.725.000	6,68%	2,23%	68,89%		
			Output :	Tersedianya lahan pembangunan sarana perkantoran	Kegiatan	1	1	100%	33,33%			
			Outcome :	Meningkatnya sarana perkantoran	Kegiatan	1	1	100%	33,33%			
		Pemeliharaan rutin/ berkala Rumah Jabatan	Input :	Jumlah Dana	Rp.	120.000.000	110.009.500	91,67%	30,56%	97,22%		
			Output :	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /berkala Rumah Jabatan	Bulan	12	12	100%	33,33%			
			Outcome :	Meningkatnya umur ekonomis/ rumah jabatan	Bulan	12	12	100%	33,33%			
		Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Input :	Jumlah Dana	Rp.	100.000.000	78.037.000	78,04%	26,01%	92,68%		

			Output :	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	Bulan	12	12	100%	33,33%			
			Outcome :	Meningkatnya umur ekonomis gedung kantor	Bulan	12	12	100%	33,33%			
		Rehabilitasi sedang / berat Rumah Jabatan	Input :	Jumlah Dana	Rp.	50.000.000	34.875.000	69,75%	23,25%	89,92%		
			Output :	Tersedianya Dana Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan	Kegiatan	3	3	100%	33,33%			
			Outcome :	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan	Kegiatan	3	3	100%	33,33%			
		Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor	Input :	Jumlah Dana	Rp.	145.000.000	144.500.000	99,66%	33,22%	99,89%		
			Output :	Tersedianya Dana Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor (Gudang Genset)	Kegiatan	1	1	100%	33,33%			
			Outcome :	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (Gudang Genset)	Kegiatan	1	1	100%	33,33%			

		Pengadaan AC	Input :	Jumlah Dana	Rp.	63.000.000	62.820.000	99,71%	33,24%	99,90%		
			Output :	Tersedianya Sarana dan prasarana kantor	Unit	3	3	100%	33,33%			
			Outcome :	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	Unit	3	3	100%	33,33%			
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Input :	Jumlah Dana	Rp.	438.150.000	387.564.000	88,45%	29,48%	96,15%		
			Output :	Tersedianya Pakaian Dinas Anggota DPRD	stel	160	160	100%	33,33%			
			Outcome :	Meningkatnya Disiplin dalam hal penampilan dan kerapian berpakaian	stel	160	160	100%	33,33%			
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input :	Jumlah Dana	Rp.	668.500.000	647.125.895	96,80%	32,27%	101,60%		
			Output :	Tersedianya Dana Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang	75	78	104,00%	34,67%		95,51%	

			Outcome :	Meningkatnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	75	78	104,00%	34,67%			
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPRD	Input :	Jumlah Dana	Rp.	104.170.000	86.247.500	82,79%	27,60%	94,26%		
			Output :	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	3	3	100%	33,33%			
			Outcome :	Meningkatnya pembuatan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	3	3	100%	33,33%			
		Penyusunan Pelaporan Keuangan	Input :	Jumlah Dana	Rp.	476.480.200	381.960.929	80,16%	26,72%	93,39%		
			Output :	Tersedianya Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan	Laporan	19	19	100%	33,33%			
			Outcome :	Meningkatnya Penyelesaian Laporan Keuangan SKPD	Laporan	19	19	100%	33,33%			

		Penyusunan Program dan Rencana Kerja	Input :	Jumlah Dana	Rp.	25.500.000	24.868.550	97,52%	32,51%	99,17%		
			Output :	Tersedianya Dokumen Program dan Rencana Kerja	Dokumen	5	5	100%	33,33%			
			Outcome :	Meningkatnya Dokumen Program dan Rencana Kerja	Dokumen	5	5	100%	33,33%			
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Input :	Jumlah Dana	Rp.	68.770.000	46.369.200	67,43%	22,48%	89,14%		
			Output :	Tersedianya Laporan Inventaris Barang Milik Daerah	Dokumen	4	4	100%	33,33%			
			Outcome :	Meningkatnya Pelaporan dan Penatausahaan Aset	Dokumen	4	4	100%	33,33%			

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2018**

INSTANSI : SEKRETARIAT DPRD KOTA PALANGKA RAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	CAPAIAN TINGKAT CAPAIAN	KATEGORI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Meningkatnya Produk - produk Kebijakan	1.1	Persentase produk hukum daerah (legislasi)	100,00%	91,85%	91,85%	sangat berhasil